

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Setiap individu akan melalui tahapan perkembangan dan tugas perkembangannya, salah satu tugas perkembangan yang harus dipenuhi adalah tugas perkembangan pada dewasa awal yakni kedekatan dengan orang lain (*intimacy*) dan berusaha menghindar (*isolation*) (Erikson dalam Papalia, Olds & Feldman, 2008). Pada masa ini, dewasa muda siap menjalani hubungan-hubungan yang intim-akrab, seperti persaudaraan, hubungan kerja serta cinta seksual. Hubungan intim yang terbentuk akan mendorong dewasa awal memiliki hasrat seksual dengan seseorang yang dicintai. Hampir di seluruh masyarakat, hubungan seksual dan keintiman dapat diperoleh dari pernikahan atau perkawinan (Desmita, 2006).

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan seseorang (Ardhani, 2015). Menurut Walgito (2004) pernikahan merupakan bersatunya seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Menurut Olson, DeFrain & Skogrand (2011) pernikahan adalah sebuah komitmen legal dengan ikatan emosional antara dua orang untuk saling berbagi keintiman fisik, emosional, tanggung jawab dan sumber pendapatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Gunarsa & Guarsa (dalam Ardhani, 2015) dalam perkawinan terdapat dua orang yang saling merindukan, saling menginginkan kebersamaan, saling membutuhkan,

saling memberi dukungan, saling melayani, dan diwujudkan dalam kehidupan bersama. Pernikahan dapat langgeng selamanya atau berakhir dengan perceraian (Ardhianita & Andayani, 2015).

Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia meningkat. Dari tahun 2014 sebanyak 344.237, naik menjadi 365.633 perceraian di tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya. Sesuai dengan data Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2016, pihak istri lebih banyak mengajukan cerai ke Pengadilan Agama (PA) dengan total 224.240 laporan yang diterima, perceraian terjadi karena beberapa faktor, seperti suami tidak menafkahi keluarga, ketidakmampuan pasangan dalam mengelola kebutuhan keluarga maupun membangun hubungan satu sama lain (Republika, 2018). Hal serupa juga terjadi di kota Bekasi, berdasarkan data dari pengadilan Agama kota Bekasi pada tahun 2017 mencapai 2.867 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.086 kasus perceraian yang digugat oleh ibu rumah tangga. Pemicu gugatan perceraian tersebut adalah persoalan ekonomi karena suami tidak menafkahi keluarganya sedangkan ibu tidak memiliki penghasilan atau tidak bekerja (Jawa barat *News*, 2018).

Menurut Firdausi (dalam Astuti, 2013) ibu yang tidak bekerja adalah ibu yang hanya menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga dan menghabiskan waktunya dirumah tanpa terikat pekerjaan diluar rumah. Ibu rumah tangga adalah wanita yang lebih banyak menghabiskan waktunya dirumah, menjaga anak-anak

dan mengasuh sesuai dengan pola-pola yang diberikan masyarakat (Dwijayanti dalam Devi & Fourianalistyawati, 2018).

Menjadi ibu rumah tangga adalah pilihan. Ibu rumah tangga dianggap lebih mulia karena rela melepas karirnya dan memilih untuk tinggal dirumah dan membesarkan anak (Limilia & Prasati, 2016). Menurut Ayu (dalam Nihayah, 2016) masalah-masalah yang dialami ibu rumah tangga yang tidak bekerja disebabkan oleh masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah keuangan, kebutuhan rumah tangga yang semakin mahal, masalah dengan diri sendiri, masalah dengan pekerjaan rumah tangga, masalah dengan keluarga, dan campur tangan mertua.

Sementara dalam budaya Jawa yang menganut sistem Patriarki memposisikan perempuan lebih rendah daripada kaum laki-laki baik dari sektor publik maupun dalam rumah tangga (Sihite dalam Putri & Lestari, 2015). Dalam budaya Jawa, citra perempuan yang ideal yaitu memiliki sifat yang lemah lembut, penurut, tidak membantah dan tidak boleh melebihi laki-laki. Peran yang dianggap ideal seperti mengelola rumah tangga, pendukung karir suami, istri yang patuh dengan suami dan ibu bagi anak-anaknya (Raharjo dalam Putri & Lestari, 2015). Menurut Hardjodisastro & Hardjodisastro (dalam Putri & Lestari, 2015) kekuasaan seorang istri dalam masyarakat Jawa tradisional hanyalah sebatas dalam hal domestik seperti memasak dan mencuci.

Menurut Pujiastuti & Retnowati (2004) seorang wanita, terutama yang berperan sebagai istri banyak mengalami permasalahan psikologi karena adanya berbagai perubahan yang dialami saat sudah menikah, antara lain yaitu perubahan

peran sebagai istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Menjadi ibu rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan, seringkali dihadapkan pada rasa bosan terhadap aktivitas yang dilakukan sehari-hari dan berulang-ulang, sehingga dapat menimbulkan stress (Rosalina & Hapsari, 2014). Pujiastuti & Retnowati (2004) mengungkapkan bahwa pekerjaan mengurus rumah tangga adalah pekerjaan yang tidak digaji, berlangsung secara terus menerus tanpa henti serta melelahkan. Ibu yang tidak bekerja dapat mengalami kejenuhan akibat dari rutinitas yang dilakukannya sehari-hari, selain itu lingkup sosial yang terbatas juga dapat menimbulkan rasa kesepian.

Berdasarkan hasil penelitian Sunardi (dalam Putri & Siudhana, 2013) menemukan bahwa ibu rumah tangga merasa kurang berharga karena pekerjaan dan tugas kerumahtanggaan yang di nilai tidak memiliki nilai tukar ekonomis serta di anggap rendahan. Banyaknya tugas yang dijalani oleh ibu rumah tangga membuat perasaan jenuh atau bosan, sehingga kurangnya perhatian dari pasangan akan menjadikannya tidak bahagia dalam pernikahannya (Grotte & Clark dalam Nihayah, 2016). Menurut Baron & Byrne (2005) pembagian peran antara suami istri yang menempatkan istri sebagai ibu rumah tangga dipersepsikan ketidakadilan mengenai pembagian tugas yang berhubungan dengan konflik dan ketidakpuasan pernikahan.

Ketidakpuasan dalam pernikahan yang dirasakan oleh istri juga di dukung dengan adanya hasil survei di Amerika Serikat, bahwa istri akan cenderung memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih rendah yaitu sebanyak 56%, sedangkan suami memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi yaitu sebanyak 60%

(Unger & Crawford dalam Pujiastuti & Rernowati, 2004). Hal ini juga di dukung oleh hasil penelitian Bell (dalam Desmita, 2006) istri memiliki kepuasan pernikahan yang rendah dibandingkan dengan suami.

Menurut Olson & Olson (2000) mengemukakan kepuasan pernikahan adalah evaluasi terhadap area-area dalam pernikahan. Area ini mencakup komunikasi yang menyenangkan, fleksibilitas pasangan, kedekatan antara pasangan suami istri, kecocokan kepribadian, resolusi konflik, relasi seksual, kegiatan dalam mengisi waktu luang, hubungan baik dengan keluarga dan teman, cara mengelola keuangan dan keyakinan spiritual.

Olson & Olson (2000), yang mengacu pada *ENRICH Marital Satisfaction Scale* mengemukakan beberapa aspek untuk mencapai kepuasan pernikahan, yaitu : komunikasi, fleksibilitas pasangan, kedekatan, kecocokan kepribadian, resolusi konflik, relasi seksual, kegiatan mengisi waktu luang, keluarga dan teman, pengelolaan keuangan, keyakinan spiritual.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan 15 Oktober 2018 di desa Kemusuk Kidul dan Pringgan terhadap lima ibu yang tidak bekerja. Subjek hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidak bekerja di luar rumah, usia pernikahan di atas 5 tahun dan memiliki anak. Diperoleh dari kelima subjek memunculkan aspek-aspek kepuasan pernikahan yang cenderung rendah. Menurut subjek pada aspek komunikasi subjek merasa kurang merasakan kenyamanan dalam membagi dan menerima informasi. Subjek merasa komunikasi dengan suaminya kurang lancar karena berbicara hanya untuk membahas hal-hal yang penting saja. Pada aspek

fleksibilitas pasangan subjek merasa mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga tanpa bantuan suami, terkadang subjek merasa kerepotan dan kelelahan.

Pada aspek kedekatan pasangan subjek merasa kedekatan yang terjalin dengan pasangan kurang, bahkan anak juga tidak terlalu dekat dengan suami. Pada aspek kecocokan kepribadian, subjek merasakan ada beberapa sifat suami yang bertolak belakang dengan istri yang menyebabkan subjek tidak nyaman dengan hubungan pernikahannya yaitu seperti adanya sifat keras yang dianggap kurang sesuai apabila diterapkan dalam rumah tangga. Pada aspek resolusi konflik subjek merasa kurang dapat menyelesaikan permasalahan sendiri dan membutuhkan bantuan suami. Pada aspek relasi seksual subjek cenderung mengabaikan keinginan-keinginan untuk berhubungan seksual dan lebih meilih untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau mengurus anak-anak. Selain itu, terdapat juga subjek yang mengatakan tidak ingin meminta terlebih dahulu untuk berhubungan seksual dengan suami karena gengsi.

Pada aspek mengisi kegiatan waktu luang subjek merasa pekerjaan rumah tangga tidak ada habisnya, sehingga subjek merasa tidak memiliki waktu luang. Pada aspek keluarga dan teman subjek merasa jarang bertemu dengan keluarga ataupun teman-teman karena kesibukan dalam mengurus rumah dan anak-anak. Pada aspek pengelolaan keuangan, 4 dari 5 subjek mengaku bahwa suami menyerahkan seluruh pendapatannya kepada subjek dan subjeklah yang berperan penuh untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan. Sekalipun pernah terjadi beberapa kali konflik, yaitu mengenai suami yang merasa tidak percaya dengan banyaknya pengeluaran bulanan yang ada. Sikap suami yang

seperti itu menjadikan subjek cenderung sakit hati karena cenderung diragukan dan tidak dipercaya dalam pengelolaan keuangan dalam rumah tangganya. Selain itu, terdapat satu subjek yang pengelolaan keuangannya adalah suami, segala keperluan soal rumah tangga dan sekolah anak yang mengatur adalah suami. Pada aspek keyakinan spiritual subjek merasa kurang dalam melakukan kegiatan keagamaan bersama.

Berdasarkan data di atas, terdapat hambatan dalam pemenuhan aspek-aspek kepuasan pernikahan seperti komunikasi, fleksibilitas pasangan, kedekatan pasangan, kecocokan kepribadian, resolusi konflik, relasi seksual, kegiatan mengisi waktu luang, keluarga dan teman, pengelolaan keuangan, dan keyakinan spiritual. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan pernikahan pada ibu yang tidak bekerja.

Setiap pasangan yang menikah akan cenderung memiliki keinginan untuk mencapai kepuasan dalam pernikahannya (Papalia, Olds, & Feldman, 2009). Menurut Rini & Retnaningsih (2008) setiap individu yang menikah tentunya menginginkan pernikahan yang sukses dan sekali seumur hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat Ardhani (2015) pernikahan yang bahagia, harmonis, kekal, dan memuaskan merupakan dambaan setiap pasangan suami istri.

Menurut Muslimah (2014) kepuasan pernikahan memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan sebuah pernikahan. Levenson dkk (dalam Muslimah, 2014) mengungkapkan bahwa kepuasan pernikahan membuat pernikahan bertahan lama dan mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian sehingga akan merasa lebih bahagia dan memiliki kehidupan yang baik. Rini &

Retnaningsih (2008) mengungkapkan bahwa dampak dari ketidakpuasan pernikahan dapat menyebabkan perceraian dan konflik antara pasangan suami istri. Berdasarkan hasil penelitian Pujiastuti & Retnowati (2014) terdapat hubungan antara kepuasan pernikahan dengan depresi. Apabila seseorang tidak puas dalam pernikahannya maka akan menyebabkan terjadinya depresi.

Beberapa penelitian telah menemukan beberapa faktor yang berhubungan atau mempunyai asosiasi dengan kepuasan pernikahan, di antaranya harga diri (Yadalijamaloye, Naseri, Khaledian & Ahrami, 2013), sikap keagamaan (Dowlatabdi, Saadat & Jahangiri (2013), keterampilan komunikasi interpersonal (Muslimah, 2014), kelekatan (Soraiya, Khairani, Rachmatan, Sari, & Sulistyani, 2016), *gratitude* (Novianty & Goei, 2013), empati (Sari & Fauziah, 2016), kehadiran anak (Carl dalam Pratiwi, 2016), dan usia pernikahan (Rini & Retnaningsih, 2008).

Pada penelitian ini, peneliti memilih faktor harga diri sebagai faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan karena kepuasan kebutuhan akan rasa harga diri merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi dengan baik (Maslow, dalam Walgito, 2004). Kepuasan akan kebutuhan harga diri dapat menimbulkan perasaan dan sikap percaya diri, diri bahagia, diri mampu, dan perasaan penting di dunia (Alwisol, 2004).

Hal ini didukung dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa subjek cenderung memiliki harga diri yang rendah. subjek mengatakan bahwa Subjek kurang dalam berkomunikasi dengan pasangan, misalnya dalam hal pemecahan masalah, sehingga subjek merasa kurang penerimaan dari suami dan

tidak dapat terbuka dalam berkomunikasi, hal ini menunjukkan rendahnya aspek keberartian diri (*significance*). Subjek kurang dapat menunjukkan kekuatannya dihadapan orang lain, misalnya subjek tidak dapat mempengaruhi pasangannya untuk membantu dalam pekerjaan rumah tangga, sehingga subjek memilih untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah sendiri, hal ini menunjukkan rendahnya aspek kekuatan individu (*power*). Subjek kurang dapat mengelola keuangan rumah tangga karena yang mengatur keuangan adalah pasangan, misalnya membayar sekolah anak dan mengatur uang belanja, hal ini menunjukkan rendahnya aspek kompetensi (*competence*). Subjek merasa kurang dalam melaksanakan kegiatan beragama bersama pasangan, 1 dari 5 subjek bahkan sangat kesulitan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan bersama pasangan karena pasangannya adalah seorang mualaf yang pengetahuan agama islamnya kurang, hal ini menunjukkan rendahnya aspek kebajikan (*virtue*).

Menurut Coopersmith (1967), harga diri adalah evaluasi individu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, yang mengekspresikan sikap setuju atau tidak setuju dan menunjukkan besarnya kepercayaan individu terhadap kemampuannya, keberartiannya, kesuksesan dan keberhargaan. Menurut Coopersmith (1967) terdapat beberapa aspek dalam harga diri, yaitu keberartian diri (*significance*), kekuatan individu (*power*), kompetensi (*competence*), ketaatan (*virtue*).

Kepuasan pernikahan berkorelasi dengan sejumlah variabel psikologis, salah satunya adalah harga diri (Yadalijamaloye, Naseri, Khaledian & Ahrami, 2013). Ketika individu ingin merasakan kepuasan pernikahan dan meningkatkan

efisiensi keluarga, individu tersebut dapat memfokuskan pada harga diri pasangan suami istri (Yadalijamaloye, Naseri, Khaledian & Ahrami, 2013).

Salah satu aspek dalam kepuasan pernikahan adalah kedekatan pasangan (Olson & Olson, 2000). Menurut Erikson (dalam Papalia, Old & Feldman, 2008) kedekatan dengan orang lain memiliki makna yang sama dengan *intimacy*. Menurut Simanjuntak (2016) keintiman pernikahan dapat dipengaruhi harga diri. Pengalaman *intimacy* individu dapat membuat individu menghargai pasangan dan selalu membuat bahagia.

Menurut Hawadi (dalam Sukmawati, 2014) perempuan merasa puas dalam pernikahan apabila pasangan menunjukkan afeksi, komunikasi, kejujuran, terbuka, berkomitmen, dan memperoleh *support* secara finansial. Long (dalam Pujiastuti & Retnowati, 2004) menyatakan bahwa istri yang tidak bekerja bergantung pada pasangannya dalam hal finansial serta emosional, ketergantungan terhadap orang lain mengindikasikan harga diri yang rendah (Satir, dalam Simanjuntak, 2016). Menurut Ancok dan Coopersmith (Ghufron & Risnawita, 2010) wanita selalu merasa harga dirinya lebih rendah daripada pria seperti perasaan kurang mampu, kurang percaya diri, dan selalu ingin dilindungi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut “apakah ada hubungan antara harga diri dengan kepuasan pernikahan pada ibu yang tidak bekerja?”.

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara harga diri dengan kepuasan pernikahan pada ibu yang tidak bekerja.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan sumbangan referensi terhadap pengembangan pengetahuan ilmu psikologi, khususnya di bidang psikologi keluarga dan perkawinan berkaitan dengan harga diri dengan kepuasan pernikahan pada ibu yang tidak bekerja.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, jika penelitian ini terbukti maka hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat membantu ibu yang tidak bekerja untuk dapat meningkatkan kepuasan pernikahan melalui harga diri.